



## DINAMIKA KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF INDONESIA MELALUI GERAKAN NON-BLOK (GNB)

### *FREE ACTIVE FOREIGN POLICY DYNAMICS OF INDONESIA THROUGH THE NON- ALIGNED MOVEMENT (NAM)*

Dzikiara Pesona Sadewa<sup>1</sup>, Falhan Hakiki<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Politik Konsentrasi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran. Email: dzikiarasadewa@gmail.com

<sup>2</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Imam Bonjol Padang. Email: falhanhakiki@stisipimambonjol.ac.id

**ABSTRAK:** Penelitian ini membahas bagaimana dinamika kebijakan politik luar negeri Indonesia melalui Gerakan Non-Blok (GNB), gerakan ini muncul sebagai aksi penolakan dari negara merdeka untuk tidak memilih antara kedua kubu negara adidaya diantaranya adalah antara Blok Barat Amerika Serikat dan juga Blok Timur diantaranya adalah Uni Soviet yang terjadi ketika di masa Perang Dingin. Indonesia menjadi pelopor terbentuknya GNB karena menolak keras atas segala bentuk penjajahan dan ingin menciptakan perdamaian. Penelitian ini digunakan dengan metode kualitatif dijelaskan secara deskriptif. Selain itu, analisis serta pengumpulan data penelitian ini diambil dari studi literatur diantaranya adalah buku, jurnal, laporan, ataupun media daring untuk menjelaskan bagaimana dinamika kebijakan politik luar negeri yang dilakukan Indonesia melalui GNB. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia masih tetap optimis dan aktif dalam GNB ini karena masih dianggap relevan terutama dalam menghadapi permasalahan global yang semakin kompleks.

**Kata kunci:** Indonesia, Politik luar negeri Bebas Aktif, GNB

**ABSTRACT:** *This research discusses Indonesia's foreign policy dynamics through the Non-Aligned Movement (NAM), which this movement emerged as an act of refusal from independent countries for not choosing' two superpowers countries, such as The West Bloc (United States) and the Eastern Bloc (Soviet Union), during the Cold War. Indonesia is one of the countries that pioneered the formation of NAM because Indonesia strongly rejects all colonialism and wants to create peace in the world. This research used qualitative methods and was explained descriptively. In addition, for analysis and collection of research data, it is taken from literature studies, including books, journals, reports, or online media, to explain how Indonesia carries out the dynamics of foreign policy policies through NAM. The results of this research show that Indonesia is still optimistic and active in NAM because it is still considered relevant, especially in dealing with increasingly complex global problems.*

**Keywords:** *Indonesia. Free Active Foreign Policy, NAM*

## PENDAHULUAN

Dengan berakhirnya Perang Dunia ke 2 pada akhirnya memunculkan Perang Dingin dari kedua negara adidaya diantaranya adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet yang menyebabkan

kekhawatiran negara negara jajahan atas isu pertentangan penyebaran ideologi dari kedua negara besar tersebut. Hal ini tentunya menjadi polemik bagi negara jajahan karena kedua negara adikuasa tersebut memiliki ideologi yang saling bertolak belakang, Uni Soviet berideologi Komunis



sedangkan Amerika Serikat (AS) berideologi Liberalisme. Kedua negara saling menyebarkan paham ideologi untuk memperluas kekuasaannya.

Perang Dingin ini dipicu dengan adanya Konferensi Postdam di tahun 1945 yang di sampaikan oleh Presiden AS Harry S Trauman berkeinginan agar dapat diselenggarakannya pemilu yang bebas untuk di kawasan Eropa Timur ketika pasca adanya kekalahan koalisi dari Italia, Jepang dan Jerman yang terjadi dalam perang dunia yang ke 2 namun disisi lain Stalin selaku dari pimpinan Uni Soviet telah menolak tegas rencana tersebut karena ketika dilakukannya pemilihan pemilu yang bebas di khawatirkan negara-negara di kawasan Eropa Timur akan memusuhi paham komunisme yang di pimpin oleh Uni Soviet perbedaan paham ini yang pada akhirnya memicu ketegangan kedua pihak. Selain itu kedua pandangan ini diikuti dengan adanya pembagian negara Jerman yang terbagi kedua bagian diantaranya adalah Jerman Barat yang ada di kubu Amerika Serikat dan juga Jerman Timur yang berada diantara kubu Uni Soviet (Luerdi & Faruki, 2017).

AS juga menerapkan politik pembersihan (*cointainment policy*) dalam mencegah paham penyebaran komunisme dari pengaruh Uni Soviet di seluruh dunia. Hal ini disebabkan karena muncul anggapan bahwa Uni Soviet telah melakukan ekspansi tanpa batas. Selain itu, juga bukan hanya itu saja hal ini diperparah dengan adanya pembentukan pakta pertahanan militer yaitu *The North Atlantic Treaty Organization* (NATO) di

tahun 1947 oleh AS bersama dengan negara-negara di Eropa barat yang diantara lain berpaham ideologi Liberal. Uni Soviet mengadakan hal yang serupa dengan pembentukan Pakta Warsawa di tahun 1955 dalam pembentukan perjanjian pakta pertahanan militer bersama dengan negara di kawasan Eropa Timur yang berideologi Komunis sehingga pada akhirnya menyebabkan ketegangan di dalam dunia internasional. Hal ini tentunya menyebabkan masalah baru dikarenakan setiap kubu mulai melakukan usaha dalam menarik negara negara yang berada di kawasan Asia dan juga Afrika untuk dapat mendukung paham mereka masing masing. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan sebuah dorongan yang sangat kuat dari para pemimpin di dunia ketiga agar dapat keluar dalam tekanan dari kedua kubu tersebut.

Pada saat itu Indonesia dipelopori oleh Presiden Soekarno diikuti juga perdana menteri dari India diantaranya adalah Jawaharlal Nehru dan juga beberapa pimpinan negara lain di kawasan Asia dan Afrika telah merasakan dampaknya bahwa polarisasi yang sudah terjadi di masa perang dingin pada umumnya tidak jauh berbeda dengan adanya Kolonialisme namun hal ini di bentuk dengan sedemikian rupa dengan cara yang lain (Akbar, Subagyo, & Oktaviani, 2020). Pada akhirnya di tahun 1960an, negara-negara yang merdeka telah melakukan pembentukan dalam Gerakan Non-Blok (GNB) , gerakan ini menjadi tekad suatu negara merdeka yang tanpa memihak Blok Barat ataupun Blok Timur. GNB juga mempunyai tujuan untuk menciptakan perdamaian dunia dengan



berdasarkan terhadap prinsip hidup yang dapat berdampingan secara damai untuk menentang berbagai paham seperti imperialisme, neokolonialisme, kolonialisme juga menentang dalam perbedaan warna kulit termasuk Zionisme dalam berbagai bentuk sebuah dominasi, ekspansi dan juga dalam pemusatan bentuk kekuasaan (Natasya, 2003).

Indonesia menjadi salah satu Negara pelopor pembentukan proses Gerakan Non-Blok yang dilandaskan prinsip dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia hal ini tentunya tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang berada di alinea pertama yaitu “sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus di hapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Selain itu juga Indonesia memiliki prinsip untuk melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Prinsip itulah yang kemudian menjadi salah satu penggerak dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif oleh karena itulah Indonesia mendukung proses terbentuknya GNB (Haryanto, 2014).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan fenomena di atas terutama dalam Kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia dan Pembentukan GNB. Salah satunya adalah penelitian yang di tulis oleh Ningrum Natasya dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang berjudul “Gerakan Non-Blok dalam Masa Kepemimpinan Indonesia 1992-1995”. Pada

penelitian ini dijelaskan bahwa GNB ini muncul sebagai aksi negara negara merdeka untuk berupaya tanpa memihak Blok Barat ataupun Blok Timur dikarenakan negara-negara ini tidak ingin terlibat dengan penjajahan. Mereka juga ingin menciptakan perdamaian. Adanya peran Indonesia dalam Konferensi Asia- Afrika yang disenggarakan di Bandung yang di harapkan menciptakan dialog serta kerjasama dengan negara Utara maupun Selatan yang sama-sama menentang Blok Barat maupun Blok Timur (Natasya, 2003).

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Fardlan Muzakki dari Zhejiang University dengan judul “*Theory, Practice, and Analysis of Indonesia’s Foreign Policy*”. Penelitian ini membahas bagaimana strategi dari politik luar negeri Indonesia dan juga mencocokkan kebijakannya dengan teori yang mendasari politik luar negeri: oleh perspektif Realisme, Idealisme, dan Konstruktivisme yang lalu dianalisis melalui konsep Middle Power. Kesimpulan dari penelitian ini adalah politik luar negeri Indonesia dianggap sebagai sebuah kebijakan yang cukup unik dan langka karena fokus utama politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif di mana ketika masa Perang Dingin Indonesia menjadi negara yang cukup populer karena ketika itu Indonesia baru menjadi negara merdeka di tahun 1945 dan dianggap sebagai negara perintis politik luar negeri Non-Blok melalui konferensi di Bandung di era Perang Dingin (Muzakki, 2017).



Penelitian terakhir dilakukan oleh Fiky Arista, Suwirta, dan Farida Sarimaya dengan judul “Perbandingan Kebijakan Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja, dan Ali Alatas Terhadap Politik luar negeri Bebas Aktif Indonesia pada Masa Orde Baru”. Penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah di masa Orde Baru untuk mempertahankan politik luar negeri bebas aktif oleh ketiga tokoh diantaranya adalah Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja, dan Ali Alatas Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil oleh ketiga tokoh tersebut berbeda-beda cara pengambilan suatu kebijakan luar negerinya. Adam Malik di masa itu masih mengalami masa transisi Orde Lama ke Orde Baru dan juga berfokus dalam penyelesaian masalah masalah yang terjadi sebelumnya. Berbeda dengan Mochtar Kusumaatmadja yang lebih berfokus dalam wawasan nusantara dan hukum internasional. Selain itu juga Ali Alatas lebih berfokus dalam masalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan telah menjadikan Indonesia menjadi ketua gerakan Non-Blok. Ketiga tokoh dari Menteri Luar Negeri tersebut pada akhirnya telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang aktif dalam menyelesaikan berbagai masalah regional maupun internasional (Arista, Suwirta, & Sarimaya, 2017).

Berbeda dengan ketiga penelitian di atas, penelitian ini lebih berfokus terhadap bagaimana dinamika kebijakan politik luar negeri Bebas Aktif Indonesia melalui GNB di mana Indonesia memiliki sebuah prinsip dalam menciptakan perdamaian

dan menentang segala bentuk penjajahan oleh karena itulah penelitian ini bertujuan menggambarkan peran yang dilakukan Indonesia dalam kebijakan politik bebas aktifnya melalui GNB

## TINJAUAN PUSTAKA

### KETAHANAN REGIONAL

Ketahanan Regional menjadi salah satu rumusan strategi nasional untuk dapat memperhitungkan kondisi serta merumuskan berbagai strategi dari faktor internal maupun eksternal yang dimana faktor faktor tersebut dapat memberikan pengaruhnya yang besar diantaranya adalah dari segi geografi, ideology, kekayaan alam, politik, ekonomi sosial budaya, demografi, pertahanan dan juga keamanan untuk menyesuaikan kondisi global ataupun regional.

Maraknya berbagai pengelompokan regional telah mengambil alih untuk dapat mengambil peran baik dari politik ataupun ekonomi yang berlangsung sudah sangat lama, di sisi lain telah ditutupi dengan adanya persaingan kekuatan bipolar yang menyebabkan hilangnya ketegangan di dunia bahkan saat ini telah memunculkan eksistensi para kelompok regional di panggung internasional. Pengelompokan regional ini dapat dilihat sebagai suatu upaya proses untuk menuju integrasi ekonomi ataupun juga politik (Roza, Adjamsyah, Respatii dkk, 2006). Selain itu juga di dalam pengelompokan regional ini sedang mencoba meningkatkan integrasi untuk turut serta dalam menghilangkan ketegangan dunia melalui kerjasama peningkatan ekonomi untuk menciptakan sebuah perdamaian dunia melalui



GNB hal ini dimaksudkan untuk dapat mewujudkan cita-cita di masa depan dengan kondisi yang lebih baik dan damai di tengah adanya ruang dan waktu (Mulyono, 2017). GNB lahir pasca perang dunia yang ke-2. Perang ini telah menghancurkan ekosistem dan juga berbagai sektor yang penting. Perang dunia ke-2 di dalam konteks politik membentuk fragmentasi Negara-Negara yang telah terasosiasi ke dalam dua blok yang memberikan pengaruh hegemoni yang masif terhadap negara lain yang berada di blok barat telah membentuk NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) dan juga blok timur yang ikut membentuk Pakta Warsawa. Tidak hanya itu, kedua kubu ini masih tetap mencari sekutu tambahan untuk menambah pertahanannya di kawasan Asia, Afrika, dan juga Amerika. Pada akhirnya, beberapa Negara juga tidak ingin berpihak terhadap salah satu blok barat maupun timur yang pada akhirnya mereka memilih netral dengan mendirikan Gerakan Non-Blok (GNB).

GNB menjadi ketahanan regional yang dilakukan oleh negara-negara dalam merumuskan strategi pembentukan politik luar negerinya. Ketahanan Regional menjadi salah satu rumusan strateginya untuk tidak memihak kedua belah pihak. Adanya kesamaan negara yang pernah dijajah menjadikan negara Non-Blok ini untuk dapat menciptakan perdamaian dunia yang sesuai dengan sistem serta rangsangan dari lingkungan eksternal untuk menciptakan perdamaian dunia untuk menegakan prinsip-prinsip hidup yang saling berdampingan secara damai untuk menentang

paham radikal seperti neokolonialisme, imperialisme, dan kolonialisme yang dimana di masa saat ini bukan hanya isu kolonialisme saja melainkan juga isu yang lainnya mulai dari isu ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

#### **POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF**

Politik Luar Negeri merupakan sebuah rangkaian kebijakan yang otoritatif terhadap suatu negara terhadap dunia luar yang dipengaruhi dan dibentuk oleh faktor internal ataupun juga eksternal yang saling berinteraksi satu sama lain. Politik Luar Negeri juga menggambarkan tindakan suatu Negara untuk mengarahkan berbagai tindakan di dalam situasi tertentu yang telah dipengaruhi oleh kondisi dalam ruang dan waktu dengan menyesuaikan kondisi di dalam lingkungan internasional (Pangestika, 2021).

Politik luar negeri juga menjadi tujuan nasional di mana terdapat keinginan negara yang hendak ingin dicapai. R. Sumpena Prawira Saputra juga mengungkapkan bahwa politik luar negeri menjadi kumpulan kebijakan nasional yang semata-mata dimaksudkan untuk dapat mengabdikan terhadap tujuan yang sudah ditetapkan, khususnya adalah terhadap tujuan dalam kepentingan nasional. Selain itu, pada hakekatnya politik luar negeri ini merupakan pola serta sikap bentuk respon terhadap lingkungan ekologis (Saputra, 1985).

Kajian politik Luar negeri menjadi suatu sistem serta rangsangan dari lingkungan eksternal sedangkan disisi lain secara domestik politik luar



negeri telah mempengaruhi suatu negara dan pengambilan keputusan dan dipersempikan terhadap proses koversi menjadi output terhadap proses perumusan politik luar negeri suatu negara mengacu terhadap situasi eksternal maupun internal untuk mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan berbagai sarana dan kapabilitas yang dimilikinya (Rosenau & James, 1980).

Kebijakan Luar Negeri menjadi sebuah strategi serta tindakan yang dibentuk oleh pengambil keputusan negara dalam menghadapi negara termasuk unit politik internasionalnya untuk dapat mencapai tujuan serta kepentingan nasionalnya, Selain itu juga Holsti telah memasukan ide dan aspek dalam pengambil kebijakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan untuk menciptakan perubahan dalam lingkungannya. Hal ini juga dapat dilihat dalam bentuk kebijakan, perilaku negara ataupun juga tindakan dari negara tersebut.

Pemahaman Holsti juga telah menunjukkan bahwa titik tekan dalam pemberian ide dan rencana dalam memahami politik luar negeri bahwa tidak hanya tindakan nyata ataupun kebijakan tertulis, melainkan juga ide menjadi sangat penting dalam membuat rencana terhadap pengambil kebijakan politik luar negeri yang bisa saja dapat berupa perilaku yang tidak hanya betuk dari kebijakan dan tindakan (Muttaqien & Dharmaputra, 2013 , p. 2). Politik luar negeri Bebas Aktif merupakan salah satu bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia agar bisa

menaikkan kiprahnya di dunia internasional dalam kerja sama ekonomi ataupun untuk menciptakan perdamaian di dunia tanpa memihak salah satu pihak salah satunya adalah dengan bergabung dengan negara Non-Blok yang bertujuan menciptakan perdamaian dan penghapusan penjajahan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif lalu dianalisa dengan mengambil dari studi literatur ataupun media online diantaranya adalah buku-buku, jurnal, laporan ataupun media daring. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan fenomena dinamika kebijakan politik luar negeri Bebas Aktif Indonesia melalui GNB

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Awal mula terbentuknya GNB ini sebenarnya bukan hanya faktor dari ketegangan antara kedua kubu Blok Barat dan Blok Timur saja tetapi juga faktor lainnya. Presiden Broz Tito juga menyampaikan faktor tersebut ketika dia menjadi pimpinan pertama GNB di Belgrade pada tahun 1961. Faktor faktor tersebut diantaranya adalah

1. Adanya kecemasan dari masing masing negara yang sedang berkembang dan baru merdeka yang pada akhirnya negara negara ini menghendaki dan menjunjung tinggi perdamaian dan mencegah agar kedua kubu ini tidak berkonflik

2. Pada tahun 1956 terdapat sebuah dokumen Brioni di tahun 1956 yang sudah di tandatangani oleh perdana menteri India yaitu Jawaharlal Nehru, presiden Yugoslavia yaitu Joseph Broz Tirtto, dan presiden dari Mesir Abdul Gamal Nasser dokumen tersebut menyerukan dunia agar tidak adanya keterpihakan antara Blok Barat ataupun dari Blok Timur
3. Terdapat informasi bahwa ni Soviet saat ini sedang melakukan pembangunan secara besar besaran pangkalan militer dan mengirim mliternya di Kuba dan mengirimkannya sebagian militernya di beberapa wilayah dengan memiliki persenjataan nuklir maupun nonnuklir. Hal ini tentunya telah menyebabkan Amerika Serikat khawatir terhadap kemandirian negaranya yang pada akhirnya menimbulkan ketegangan kedua kubu kembali terjadi (Wuryanto, 2017)

Para pimpinan dari negara yang baru merdeka telah mendeklarasikan keinginannya untuk dapat tetap independen tanpa memilih Blok Barat maupun Blok Timur. Sejak bubarnya Uni Soviet di tahun 1991, gerakan ini mulai banyak dikritik tentang relevansinya di masa ini oleh pengamat internasional yang menyebutkan bahwa GNB ini hanya merupakan bagian dari sejarah saja. Namun, negara anggota gerakan ini tetap optimis bahwa GNB dapat menjadi salah satu wadah yang diharapkan dapat menciptakan perdamaian serta

penghapusan penjajahan di dunia. Salah satu negara yang optimis dengan adanya GNB adalah Indonesia yang ketika itu di tahun 1992 pernah menjadi ketua GNB dan mendukung segala bentuk perdamaian dan penghapusan penjajahan (Hermawan, Indraswari, Hapsari, & Diangga, 2013).

### **PERAN INDONESIA DALAM GERAKAN NON-BLOK DAN TERSENGGARANYA KONFERENSI ASIA AFRIKA**

Indonesia menjadi negara yang memiliki prinsip menentang segala bentuk penjajahan. Hal ini tentunya tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yang ada di dalam alinea pertama bahwa “sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus di hapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan “ oleh karena itu, Indonesia sangat mendukung GNB. Hal ini juga didukung dengan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1995 penyelenggaraan konferensi ini berawal di masa kepemimpinan Presiden Soekarno yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan India saat itu. India juga menjadi salah satu negara yang telah mengakui kemerdekaan Indonesia

Kedua negara ini juga memiliki hubungan yang sangat baik hal ini terlihat ketika presiden Soekarno pernah di undang oleh presiden dari India yaitu Rajendra Prasad dan juga PM India Jawaharlal Nehru untuk menyambut perayaan kemerdekaan India dari kolonialis inggris. Ketika itu Soekarno dan Jawaharlal Nehru menjadi salah satu pelopor yang



memiliki kekuatan besar di kawasan Asia pada saat itu dan sama-sama memiliki prinsip penentangannya terhadap segala bentuk penjajahan. Para pemimpin negara Asia lainnya juga mulai muncul sebagai negara yang merdeka yang memilih untuk tidak memihak pergerakan dari kedua blok dari Blok Barat maupun Blok Timur yang lalu pada akhirnya diselenggarakan Konferensi Asia Afrika di tahun 1955 untuk mendukung pergerakan Non-Blok. Konferensi KAA saat itu, emkado sorotan di dalam dunia internasional namun bukan hanya konferensi ini saja sebelumnya juga sudah ada konferensi konferensi yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia. Salah satunya adalah Konferensi Kolombo yang diselenggarakan di Sri Lanka pada tanggal 28 April sampai 2 Mei 1954.

Konferensi itu juga membahas bagaimana cara menyatukan Vietnam serta mendiskusikan juga pemulihan perdamaian di Indocina yang ketika itu juga dihadiri oleh para perdana menteri lainnya seperti Perdana Menteri Burma (Myanmar) U Nu, Perdana Menteri Sri Lanka Sir John Kotelawala, Perdana Menteri Pakistan Muhammad Ali Jinnah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Perdana Menteri Indonesia Ali Sastroamidjoyo, oleh karena itu konferensi lanjutan yang dilaksanakan di Bandung yaitu KAA merupakan salah satu keberhasilan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk menentang bentuk penjajahan dan ingin menciptakan perdamaian di dunia (Nugroho, 2016). KAA juga merupakan salah satu proses awal untuk melahirkan gerakan Non-

Blok dengan diselenggarakannya KAA pada tanggal 18-24 April 1955 dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintah dari benua Asia dan juga Afrika yang pada saat itu baru menjadi negara-negara yang merdeka berupaya untuk dapat menformulasikan kebijakan bersama terhadap tatanan dalam hubungan internasional. Dasasila Bandung menjadi salah satu bentuk yang di rumuskan dalam merumuskan prinsip-prinsip penyelenggaraan hubungan yang dilakukan kerja sama antar bangsa-bangsa. Ketika itu para tokoh kunci dalam pendirian GNB ini adalah Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser dan Presiden Indonesia Soekarno Kelima tokoh ini juga telah dikenal sebagai pendiri dari terbentuknya GNB (Kementerian Luar Negeri RI, 2014).

#### **KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA BEBAS AKTIF MELALUI GERAKAN NON-BLOK**

Politik luar negeri Indonesia pada dasarnya dilandaskan oleh 3 kategori diantaranya adalah yang pertama landasan ideologi yang ada di dalam Pancasila. Ketika itu Mohammad Hatta telah memperkuat kedudukan Pancasila sebagai landasan dalam ideologi politik luar negeri karena kelima sila yang tertuang dalam Pancasila menjadi pedoman dasar terhadap penerapan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal untuk kehidupan nasional bangsa Indonesia dalam kegiatan politik dan bernegara. Yang kedua adalah landasan konstitusional di dalam



Undang-Undang dasar (UUD) 1945 dalam pembukaan UUD 1945 telah mempertegas bahwa UUD 1945 menjadi landasan konsitusional.UUD 1945 memuat garris besar kebijakan luar negeri dalam mengatur kehidupan berbangsa maupun bernegara. Hal ini dapat dijadikan juga sebagai landasan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Dan yang terakhir adalah landasan operasional yang berkenaan dengan bagaimana prinsip serta landasan dari politik luar negeri dapat diwujudkan dan direalisasikan dari sifatnya yang idealis menjadi normative, Hal ini juga berlandaskan dari undang undang. Selain itu juga dalam perwujudannya sendiri terus berubah ubah sesuai dengan periode pemerintahan yang berkuasa demi mencapai kepentingan nasional di masa tersebut (Indrawati & Nugroho, 2019).

Politik luar negeri bebas aktif sebenarnya sudah dicetuskan pertama kali tahun 1947 oleh Sultan Sjahrir di New Delhi, saat itu di sampaikan dalam pertemuan Inter Asia Relations Conference yaitu:

“Dunia tampaknya telah memaksa kita untuk membuat pilihan kekuatan besar yang saling bermusuhan antara blok Anglo Saxon dan Soviet Rusia tetapi kita menolak untuk dipaksa. Saat ini kita mencari wujud internasional yang tentunya sesuai dengan kehidupan interen kita dan kita tidak ingin terperangkap dengan sistem yang tidak cocok dengan sistem yang kita miliki tentunya kita tidak ingin masuk ke dalam sistem yang bermusuhan dengan tujuan kita” (Deplu, 1996).

Pernyataan dari Sultan Sjahrir sudah sangat

jelas menjelaskan bahwa kebebasan menjadi sesuatu hal yang penting agar terlepas dari sistem-sistem yang tidak cocok ataupun sistem yang bertolak belakang sehingga dapat dikatakan bahwa konteks dimasa itu ketika adanya persaingan perebutan pengaruh antara 2 blok terhadap negara yang baru merdeka.

Indonesia juga tidak terlepas dari godaan pengaruh untuk memihak kepada salah satu blok, sebagai negara yang baru merdeka, tentunya hl ini tidak mudah dikarenakan perlu adanya pembangunan sistem dan juga pandangan kebijakan yang cocok yang mengakibatkan konsepsi dan peran Indonesia terhadap system internasional telah mendapatkan ujian dan tekanan untuk masuk ke dalam sistem internasional agar dapat bergabung kedalam salah satu blok (Haryanto, 2014). Sementara itu juga ketika itu Indonesia sedang dihadapkan permasalahan adanya agresi dari Belanda yang menginginkan kembali menjajah Indonesia pasca kemerdekaan hal ini tentunya memunculkan situasi yang dilematis.

Kelompok kiri saat ini berusaha agar indoneisa turut bergabung dengan blok dari Komunis yang anti terhadap Barat untuk memperkuat perjuangan Indonesia dalam melawan Belanda yang merupakan dari Blok Barat. Sedangkan di sisi lainnya para pemimpin nasional diantaranya adalah seperti Sjahrir dan Hatta tidak ingin Indonesia berpihak terhadap komunis dan pada akhirnya saat itu pemerintah jmengambil jalan tengah untuk tidak memihak juga terhadap



Blok Barat dan memilih untuk netral (Legge, 1972).

Indonesia memilih untuk menerapkan prinsip politik Luar Negeri Bebas Aktif, prinsip ini pertama kali diutarakan oleh Mohammad Hatta yang di dukung dengan pidatonya yaitu “Mendayung di antara Dua Karang”. Pidato yang diutarakan Hatta lahir di tengah pertarungan dari kedua blok besar dan Indonesia memilih prinsip politik luar negeri Bebas Aktif. Menurut Mochtar Kusumaatmaja “Bebas” adalah Indonesia tidak memihak terhadap kekuatan-kekuatan yang sama atau sesuai dengan kepribadian yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagaimana yang tercermin di dalam pancasila “aktif” artinya menjalankan kebijaksanaan luar negeri nya dan Indonesia juga tidak bersifat pasif – reaktif terhadap kejadian kejadian internasionalnya melainkan bersifat aktif (Kusumaatmadja., 1983).

Melalui GNB ini tentunya sejalan dengan arah politik yang dipilih oleh Indonesia hal ini juga dapat dilihat ketika Indonesia menjadi salah negara yang menjadi pelopor atas tersenggaranya KAA di Bandung dalam menentang pilihan Blok Barat ataupun Blok Timur. Ketika itu juga banyak negara yang baru merdeka untuk dapat menentukan kebebasan arah politiknya tanpa adanya ketergantungan dan ikut terhadap salah satu blok adidaya yang sedang bertikai antara satu sama lain, Sejak itu prinsip dasar GNB dapat diterima secara luas oleh negara negara yang baru saja merdeka dari penjajahan selain itu juga setelah 6 tahun penyelenggaraan konferensi Asia Afrika yang di selenggarakan di Bandung gerakan ini diterima

lebih luas terutama dalam Konferensi Tingkat Tinggi Pertama Beograd, Yugoslavia pada tahun 1961 yang ketika itu konferensi itu dihadiri oleh 25 negara dari Asia, Eropa, Afrika dan Latin Amerika (Wuryanto, 2017).

Selain itu, juga GNB telah menempati poisisi khusus di dalam Politik luar negeri Indonesia dalam menjalankan peran yang sentral berikut adalah analisis sejarah singkat kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia melalui GNB:

Tabel 1.  
Peran Indonesia dalam GNB

Tahun	Agenda	2018
1970an	Membahas isu ekonomi anggota GNB	Indonesia dengan negara Anggota GNB lainnya membahas bagaimana saat itu isu yang dihadapi oleh dunia bukan hanya pertentangan dari kedua kubu negara besar saja, melainkan isu ekonomi juga menjadi sangat penting. saat itu mulailah dilakukan pembahasan terhadap masalah ekonomi dan <i>International Economic Order</i> .
1990an	Muncul isu GNB tidak lagi relevan pasca berakhirnya perang dingin	Sebagian negara anggota GNB mengusulkan pasca perang dingin agar dapat membahas tantangan serta permasalahan baru yang dihadapi dunia saat itu. GNB mulai melakukan pembahasan permasalahan lain yang dialami oleh dunia saat itu seperti terkait pembangunan ekonomi terutama negara berkembang, lingkungan hidup serta pengentasan kemiskinan. Saat itu menjadi focus perjuangan



		GNB di dalam forum internasional dalam dekade 90an	2009	KTT yang ke 15 GNB di Sharm El Sheikh, negara Mesir	KTT yang ke 15 ini menegaskan perhatian GNB dalam menyikapi krisis ekonomi global Selain itu, juga membahas kembali komitmen negara negara untuk dapat menjunjung prinsip-prinsip yang ada didalam piagam BB, hukum Internasional dan juga melakukan peningkatan dalam kerjasama antara negara maju maupun berkembang dalam mengatasi krisis yang telah di hadapi
1992	KTT GNB ke-10 di Jakarta	Indonesia yang ketika itu menjadi ketua GNB kembali melakukan dialog untuk membahas visi baru dari GNB diantaranya adalah sebagai berikut: Membahas terkait relevansi GNB pasca Perang Dingin dalam meningkatkan kerja sama di dalam hubungan internasional terutama dalam ekonomi internasional dan juga Meningkatkan potensi ekonomi di dalam anggota anggota GNB dengan carai peningkatkan kerja sama Selatan-Selatan.	2012	KTT GNB yang ke-16 di Tehran, Iran,	Pertemuan yang ketika itu dipimpin oleh wakil presiden dari RI yang menyepakati Tehran Final Document, Deklarasi Tahanan Politik Palestina, Deklarasi Solidaritas Palestina, Deklarasi Tehran, dan <i>Tehran Plan of Action</i> . Pertemuan ini juga di bahas rencana Venezuela menjadi tuan rumah KTT yang ke 17 GNB Wakil Presiden RI juga telah menyampaikan bagaimana pentingnya kontribusi GNB dalam menciptakan perdamaian dan kerja sama untuk menciptakan kesejahteraan rakyat baik di dalam pemerintahan ataupun di tatanan internasional. Selain itu juga Wapres RI menyampaikan perlunya GNB untuk terus membantu konkret terhadap Palestina.
1995	KTT GNB Ke-11 di Cartagena,	KTT ini mulai mendirikan <i>Non-Aligned Movement Centre for South-South Technical Cooperation</i> (NAM CSSTC) yang berada di Jakarta, di dukung bersamaan oleh pemerintah dari Brunei Darussalam dan juga dari pemerintah Indonesia Selain itu juga NAM CSSTC ini sudah menyelenggarakan kegiatan berbagai program Selain itu, NAM CSSTC juga telah menyelenggarakan kajian, pelatihan, kajian, dan lokakarya/ seminar yang telah diikuti oleh negara negara anggota dari GNB. Program ini di fokuskan pengetasan kemiskinan, memajukan usaha kecil dan menengah serta melakukan peningkatan penerapan penggunaan informasi dan komunikasi	2016	Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) GNB ke-17 di Pulau Margarita, Venezuela	Pertemuan konferensi kali ini mengusung tema " <i>Peace, Sovereignty and Solidarity for Development</i> ", banyaknya berbagai tantangan dan krisis yang telah dihadapi

	pada 17-18 September 2016.	dunia saat ini seperti adanya ketidakseimbangan politik ataupun ekonomi global, adanya krisis pengungsi ancaman dari terorisme, radikalisme dan ekstremisme serta konflik dan ketidakpercayaan antarnegara, termasuk di antara negara GNB. Selain itu juga untuk menanggapi berbagai tantangan yang dihadapi, disampaikan oleh Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri RI perlu ada perubahan pola pikir oleh negara-negara GNB. Dunia saat ini memerlukan Gerakan Non-Blok abad ke-21, yaitu GNB yang berwawasan luas, pragmatis, inovatif dan efisien	peringatan 60 tahun Gerakan Non-Blok di Beograd bahkan lebih kompleks, seperti munculnya pandemi Covid-19 dan perubahan iklim. Meskipun demikian, Dasa Sila Bandung telah menanamkan nilai dan prinsip untuk mengatasi tantangan dunia saat ini, yaitu: nilai dan prinsip persamaan antar negara, nilai dan prinsip kerja sama, serta nilai dan prinsip penghormatan terhadap keadilan.
2019	KTT GNB Ke-18 di Baku Congress Centre, Baku, Azerbaijan, Pada tanggal 25 dan 26 Oktober 2019	Kembali membahas iisu Palestina karena bagi Indonesia isu kemerdekaan Palestina telah menjadi prioritas selama Indonesia menjadi anggota tidak tetap dari dewan keamanan PBB, selain itu bagi negara anggota GNB telah mendukung peran Palestina di berbagai organisasi internasional termasuk juga kepemimpinan Palestina G77 di tahun ini	2022 KTT G20 yang dilaksanakan 15-16 November 2022. Presiden Joko Widodo di depan peserta menyampaikan pesan perdamaian supaya dunia dapat bersatu mempersiapkan diri dalam menghadapi ancaman krisis global. Terlebih pada 2023 ancaman krisis energi diprediksi bakal melanda dan berdampak pada negara-negara berkembang.
2020	KTT GNB di tahun 2020 dan diselenggarakan di Baku, Azerbaijan	Pesiden Joko Widodo mengikuti KTT) khusus membahas pe GNB dalam penanganan Covid-19 yang disampaikan dari Istana Kepresidenan presiden Joko Widodo menyerukan untuk Bersatu Melawan Covid-19”	
2021	Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)	Menlu RI menyampaikan bahwa tantangan dunia setelah 60 tahun berdirinya GNB masih besar dan	

---

(Kementerian Luar Negeri RI)

### **ANALISIS FENOMENA DINAMIKA KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF INDONESIA MELALUI GERAKAN NON-BLOK (GNB) DI MASA KINI**

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa GNB ini lahir akibat adanya persamaan negara negara yang terjajah untuk tidak memihak dua kubu rivalitas anantara Amerika Serikat dan Uni Soviet, Indonesia sudah menunjukkan eksistensinya untuk menjadi pelopor perdamaian dunia karena dengan memihak salah satu kubu dikhawatirkannya akan membentuk penajajahan baru. Melalui gerakan ini diharapkan penjajahan di atas dunia dapat di hapuskan dan dapat

menciptakan perdamaian di dunia.

Indonesia dengan kepemimpinannya menyerukan pesan perdamaian ditengah konflik negara-negara dengan kekuatan besar yaitu AS-Tiongkok serta perang Rusia dan Ukraina dan isu-isu strategis lainnya. Selain itu, presiden Indonesia menyatakan bahwa negara-negara seharusnya bersatu untuk menghadapi ancaman-ancaman global di masa yang akan datang yang berdampak luas terhadap sekitar. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia dipandang sebagai negara Non-Blok yang masih relevan saat ini, dengan tidak memihak kepada kekuatan besar dunia yang dimiliki oleh beberapa negara dan justru aktif menjalankan peran politik luar negerinya untuk menciptakan perdamaian dunia (Muhyiddin & Nashrullah, 2022; Nuary, 2022).

Isu palestina untuk sampai saat ini masih terus menjadi isu yang masih di perjuangan oleh Indonesia karena Palestina dianggap masih menjadi negara yang belum merdeka terutama juga masalah Hak Asasi Manusianya, sehingga dari tahun 1970an hingga sekarang dalam pertemuan KTT isu ini masih di bahas karena dianggap penjajahan di era baru masih ada dan harus segera di hilangkan. Selain isu Palestina saat ini GNB juga mulai membahas berbagai isu yang melanda di dunia mulai dari ekonomi, iklim, kemiskinan dan sebagainya sehingga GNB ini masih menunjukkan eksistensinya dalam menciptakan perdamaian dunia, bukan hanya bentuk pengekangan terhadap segala bentuk penjajahan melainkan juga untuk menciptakan kerjasama ekonomi ataupun politik.

Hal ini juga disampaikan langsung oleh Retno Marsudi selaku dari Menteri Luar Negeri RI menurutnya GNB saat ini masih dihadapkan dengan tantangan yang sama sejak berdirinya 60 tahun yang lalu mengenai isu kekuatan besar dunia, kesenjangan sosial, ketidaksetaraan dan juga keadilan sosial- ekonomi. Saat ini juga isu-isu tersebut menjadi sangat rumit dan memiliki tantangan tersendiri di masa ini, dengan adanya prinsip prinsip serta nilai nilai GNB yang termasuk multilateralisme yang ada saat ini menjadi sangatlah relevan

Indonesia tetap menegaskan bahwa gerakan ini harus dapat terus bersinergi untuk menjawab berbagai solusi terhadap tantangan tantangan yang baru terutama di awal tahun 2020 ketika Covid 19 telah melanda di dunia dimana indonesia juga menyerukan untuk Bersatu Melawan Covid-19. Perkembangan varian baru virus covid 19 juga menjadi tantangan tersendiri di berbagai dunia di tambah dengan permasalahan baru dimana adanya kesenjangan global antara negara negara di dunia atas adanya akses vaksin Covid 19.

Isu dalam kapasitas produksi serta distribusi vaksin dan jika tidak langsung di tangani segera maka akan dikhawatirkan pandemi tidak akan berakhir dan juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Indonesia juga turut serta membahas isu vaksin ini dimana diharapkan vaksin dapat diperoleh oleh negara di dunia tanpa terkecuali dan adanya kesetaraan dalam akses vaksin di semua negara.

Adanya penyelenggaraan KTT G20 di

Indonesia yang bertepatan di Bali di tahun 2022 merupakan salah satu pencapaian terbesar bagi Indonesia, forum G20 menjadi forum yang strategis bagi Indonesia dimana dengan adanya konferensi tersebut selain mempersatukan negara negara di dunia juga memberikan hal positif terhadap kerjasama antar Negara dalam menghadapi isu di masa kini, KTT G20 ini juga menyerukan perdamaian diantara para pemimpin dunia agar terus digaungkan. Forum tersebut juga membahas isu kisu strategis yang dihadapi dunia saat ini terutama terhadap isu dalam pemulihan ekonomi. Selain itu juga pandemic telah mendorong ratusan juta orang untuk masuk ke dalam jurang kemiskinan sehingga dapat menghambat kemajuan menuju SDG's. dan isu lain diantaranya adalah kesehatan dan perubahan iklim

### SIMPULAN

Berdasarkan hal diatas dapat diberikan kesimpulan bahwa kebijakan politik luar negeri Bebas Aktif Indonesia merupakan prinsip yang muncul berawal dari adanya pertentangan kedua kubu untuk tidak memilih kedua kubu diantaranya adalah Barat ataupun Timur. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan menolak keras segala bentuk penjajahan dan lebih mengutamakan kerja sama yang bebas dan aktif di dunia internasional.

GNB menjadi salah satu upaya yang dilakukan Indonesia bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia. Pasca berakhirnya Perang

dingin peran GNB tidak hanya sebatas menentang segala bentuk penjajahan, melainkan juga tantangan yang baru seperti masalah ekonomi, politik, kesenjangan sosial dan sebagainya dengan berbagai upaya yang dilakukan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian hal ini dapat terlihat bahwa Indonesia tetap optimis GNB masih relevan sampai sekarang terutama dalam menghadapi permasalahan global yang semakin kompleks.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, T. H., Subagyo, A., & Oktaviani, J. (2020). Realisme Dalam Kepentingan Nasional Indonesia Melalui Forum Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Gerakan Non-Blok (GNB). *Jurnal Dinamika Global*, 5(1): 123-139.
- Arista, F., Suwirta, & Sarimaya, F. (2017). Perbandingan Kebijakan Adam Malik, Mochtar Kusumaatmadja dan Ali Alatas Terhadap Politik luar negeri Bebas Aktif Indonesia Pada Masa Orde Baru. *Factum*, 6(1): 70-92.
- Deplu. (1996). *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa: buku III Periode 1960-1965*. Jakarta: Departemen Luar Negeri.
- Haryanto, A. (2014). Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indoensia: Perspektif Teori Peran. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 4(2): 17-27.
- Hermawan, Y. P., Indraswari, R., Hapsari, R. A., &



- Diangga, I. M. (2013). *Materialisasi Ide Indonesia Dalam Institusi-Institusi Internasional*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan.
- Indrawati, & Nugroho, A. Y. (2018). Penerapan Prinsip Politik luar negeri Indonesia Melalui Diplomasi Maritim. *Verity Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)*, 10(20): 14-26.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2014). *Gerakan Non-Blok (GNB)*. Retrieved Juli 15, 2021, from [https://kemlu.go.id/portal/id/read/142/halaman\\_list\\_lainnya/gerakan-non-blok-gnb](https://kemlu.go.id/portal/id/read/142/halaman_list_lainnya/gerakan-non-blok-gnb).
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2014). *Menlu RI Serukan Dukungan terhadap Perjuangan Palestina di KTM GNB*. Retrieved March 4, 2023, from <https://kemlu.go.id/portal/idD/read/2704/berita/menlu-ri-serukan-dukungan-terhadap-perjuangan-palestina-di-ktm-gnb>.
- Kusumaatmadja, M. (1983). *Politik luar negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini*. Bandung: Alumni.
- Legge, J. D. (1972). *Sukarno Sebuah Biografi Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Luerdi, & Faruki, A. (2017). Perang Dingin dan Implikasinya terhadap Sistem Politik Internasional dalam Tinjauan *High Politics*. *International Society* 4(1): 1-12.
- Muhyiddin, & Nashrullah, N. (2022). *Pakar: KTT G20 Buktikan Posisi Indonesia Sebagai Negara Non-Blok*. Retrieved December 20, 2022, from <https://www.republika.co.id/berita/rlfhwk320/pakar-ktg20-buktikan-posisi-indonesia-sebagai-negara-non-blok>.
- Mulyono, Hari (2017). *Geostrategi Indonesia dalam Dinamika Politik Global dan Regional* Jurnal Kajian Lemhannas RI Edisi 29 Maret 2017
- Muttaqien, M., & Dharmaputra, R. (2013). *Dinamika Politik luar negeri Indonesia: Sebuah Analisis Kontemporer*. Surabaya: Cakra Studio Global Strategis.
- Muzakki, F. (2017). Theory, Practice, and Analysis of Indonesia's Foreign Policy. *Translitera: Jurnal Kajian Komunikasi Dan Studi Media*, 5(2): 14-24.
- Natasya, N. (2003). *Gerakan Non-Blok dalam Masa Kepemimpinan Indonesia 1992-1995*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Nuary, M. G. (2022). *Sukses Gelar KTT G20, Dipuji Pemimpin Dunia, Jokowi Dinilai Makin Dikenal Global*. Retrieved December, 20, 2022, from <https://www.gatra.com/news-558576-politik-sukses-gelar-ktg20-dipuji-pemimpin-dunia-jokowi-dinilai-makin-dikenal-global.html>.
- Nugroho, A. S. (2016). Soekarno dan Diplomasi Indonesia. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 10(2):



125-131.

Pangestika, V. I. (2021). Kebijakan Politik luar negeri Indonesia Terhadap Pengungsi Asing dan Pencari Suaka pada Era Reformasi Perspektif Siyasah Dauliyah. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Rosenau, & James, N. (1980). *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press.

Roza Prima, Adjamsyah Sultan, Respati Nining, Azhari Siti Kusumawati, Waachyuni Rr Sri, Hendrawan Ronny dan Munaf Dicky R. (2006 *Konsepsi dan Tolak Ukur Ketahanan Regional* ). Jurnal Socioteknologi Edisi 7 tahun 5.

Saputra, S. P. (1985). *Politik luar negeri Indonesia*. Jakarta: Remaja.

Wuryanto, D. D. (2017). Indonesia Sebagai Tuan Rumah KTT Gerakan Non-Blok X Tahun 1992. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 5(2): 289-287.